

Kode/Rumpun Ilmu : 561/Ekonomi Pembangunan

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS GINI RATIO
KABUPATEN GORONTALO**

Oleh

- 1. HARIJONO H. IMBRAN, SE, M.Si /091104196501**
- 2. RUSDIANTO TONE, SE, M.Si /091210102**


**PROGARAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL (FEIS)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Identifikasi dan Analisis Gini Rasio Kabupaten Gorontalo
Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : HARIJONO H IMBRAN, S.E, M.Si
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Gorontalo
NIDN : 9990277586
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Nomor HP : 081382100742
Alamat surel (e-mail) : harijonoimbran@ymail.com
Anggota (1)
Nama Lengkap : RUSDIANTO L. TONE M.Si
NIDN : 0912108102
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 18,000,000
Biaya Keseluruhan : Rp 18,000,000

Mengetahui,
Ketua LPPM

(Dr. Yuszda K. Salimi, M.Si)
NIP/NIK 1150274

GORONTALO, 21 - 09 - 2018
Ketua,

(HARIJONO H IMBRAN, S.E, M.Si)
NIP/NIK 9990277586

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Luaran.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKAAN	7
2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	7
2.2. Konsumsi Rumah Tangga	8
2.3. Distribusi Pendapatan.....	11
2.4. Ketimpangan Pendapatan dan pembangunan.....	11
2.5. Kurva Lorenz.....	19
2.6. Teknik Perhitungan Ketimpangan.....	20
2.7. Kategori Ketimpangan.....	22
2.8. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1. Objek Penelitian.....	26
3.2. Metode Penelitian Penelitian.....	26
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	27
3.5. Teknik Analisis Data.....	29
3.6. Desain Pengukuran.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	40
5.1. Kesimpulan.....	40
5.2. Rekomendasi.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	48

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tingkat kesenjangan pendapatan dengan menggunakan pendekatan Gini Ratio. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui pengamatan dan pendataan laporan baik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPDA) Kabupaten Gorontalo, seperti Kabupaten Dalam Angka maupun Indikator Kesejahteraan hasil Sensus Nasional. Data yang bersumber dari Bappeda dan BPS berupa data Produk Domestik Regional Bruto perkapita atas Dasar Harga Konstan, dan data konsumsi rata-rata konsumsi per kapita.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Gini Ratio Kabupaten Gorontalo selang tahun 2012 – 2017 berada pada rentang sedang ($> 0,4$) atau pada level sedang atau moderat.

Kata kunci: Identifikasi, Analisis, Gini Ratio

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja dan evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini menjadi pembahasan utama diberbagai wilayah di Indonesia. Kecenderungan tersebut bukan saja menjadi fenomena nasional, tetapi juga menjadi topik yang dibahas dunia internasional. Pemikiran tersebut berangkat dari latar belakang pentingnya mensinkronkan antara pencapaian indikator-indikator perekonomian dengan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terhadap pencapaian hasil-hasil pembangunan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat memberi alternatif bagi setiap daerah untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan pembangunan, terutama perubahan kebijakan pembangunan ekonomi. Dengan perubahan kebijakan serta bertambahnya pilihan kebijakan diharapkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu daerah tidak saja mampu terlihat dari indikator-indikator makro perekonomian, namun dapat bersifat berkelanjutan serta inklusif. Untuk merancang kebijakan ekonomi yang inklusif dalam tahap perencanaan dibutuhkan adanya inisiatif-inisiatif sebagai proses refleksi secara menyeluruh dalam rangka memicu dan mempercepat revisi kerangka kerja analitis serta pembaharuan dan penguatan instrumen kebijakan-kebijakan pembangunan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten Kota. Hasil dari evaluasi kinerja pembangunan yang ada diharapkan mampu merekomendasikan perubahan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bukan tujuan akhir, namun adalah suatu alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk itu, setiap kreativitas kebijakan ekonomi diharapkan mampu untuk dapat mengusulkan perubahan paradigma yang lebih difokuskan hal-hal yang terkait kesejahteraan masyarakat dan distribusi guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kalangan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perekonomian, terutama masyarakat yang tingkat ekonominya golongan menengah ke bawah.

Untuk itu, salah satu topik terkait pembangunan manusia ditujukan untuk

memperluas pilihan masyarakat yang dapat dikembangkan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai antara lain melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan serta kesejahteraan ekonomi agar dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990). Selain dalam peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan, khususnya di Kabupaten Gorontalo yang memiliki komitmen kuat untuk mengakselerasi pencapaian pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen kuat tersebut terangkum dalam Visi dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo 2016-2020 yaitu; “Kabupaten Gorontalo Gemilang” pencapaiannya dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat, dan berkarakter.
2. Pemerintahan yang harmonis, bersih, dan dinamis.
3. Optimalisasi sumber daya alam menuju kemandirian.
4. Pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan hidup.
5. Kerjasama Global untuk pembangunan daerah

Kelima misi tersebut difokuskan melalui 3 program unggulannya yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Petanian Terpadu dan Ekonomi kreatif
3. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

Jika menyimak kondisi makro ekonomi Kabupaten Gorontalo 6 tahun terakhir (2012 – 2017) menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik, sebagaimana ditunjukkan oleh Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) selama 6 tahun terakhir (tahun 2012–2017) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2012 LPE Kabupaten Gorontalo mencapai di atas 7 % hingga tahun 2014 pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan masing-masing 6,31%, 6,62 dan 6,81% ,namun kinerja ekonomi daerah ini masih cukup baik karena masih tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

**Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo
Tahun 2012 - 2017**

Tahun	PDRB	Pertumbuhan
2012	5.594.792,60	7.74
2013	6.028.615,18	7.73
2014	6.496.912,67	7.77
2015	6.905.553,36	6.31
2016	7.362.609,08	6.62
2017	7.863.978,8	6,81

Sumber : Kabupaten Gorontalo Dalam Angka, 2018

Besaran perekonomian yang diindikasikan dengan nilai PDRB berdasarkan harga konstan juga mengalami perkembangan setiap tahunnya, walaupun prosentasi sejak 2015 mengalami penurunan cukup drastis dari 7,73 menjadi 6,31. Pada tahun 2016 menunjukkan kenaikan lagi hingga tahun 2017 mendekati 7 % atau 6,81%.

Selain itu inflasi merupakan salah satu data makro ekonomi yang mencerminkan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Seperti indikator ekonomi lainnya, inflasi dapat digunakan sebagai *early warning system* sehingga dapat dijadikan alat untuk memonitor secara dini anomali perubahan harga yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan oleh adanya konsumsi masyarakat yang berlebihan pada hari-hari raya agama, karena dampak kebijakan pemerintah atau lainnya. Monitoring harga biasanya dilakukan pada komoditi tertentu yang strategis seperti beras, minyak goreng, gula dan sebagainya. Kabupaten Gorontalo selama periode 2012-2016 mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Jika pada tahun 2015 tingkat inflasi cukup tinggi, yaitu mencapai 8,03%, pada tahun 2016 tingkat inflasi yang ada mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 3,21%.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata seringkali menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesejangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Salah satu masalah tingkat kesejahteraan di Kabupaten Gorontalo adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia pada umumnya tidak saja terjadi dikawasan-kawasan pedesaan atau pertanian (*rural*), tetapi juga menjadi masalah diperkotaan termasuk di Limboto sebagai ibukota kabupaten yang walaupun kemiskinann di Kabupaten Gorontalo lebih terkonsentrasi pada masyarakat petani yang berada di pedesaan. Masalah-masalah kemiskinan salah satunya disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Meskipun perekonomian Kabupaten Gorontalo merupakan bagian perekonomian yang berkembang, akan tetapi persoalan distribusi pendapatan yang belum merata,dapat menimbulkan masalah yang lebih besar saat ini maupun dikemudian hari.

Untuk itu, jika ketimpangan ini dibiarkan berlarut-larut maka akan semakin memperparah keadaan perekonomian Kabupaten Gorontalo ke depan. Karena itu penelitian ini difokuskan membahas tentang identifikasi dan analisis *Gini Ratio* terhadap perubahan tingkat kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Gorontalo,sebagaimana melihat tingkat distribusi pendapatan di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Gorontalo

Pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo dalam hal ini merupakan bagian dari proses perbaikan kualitas kesejahteraan ekonomi penduduk. Dimana, hal itu salah satunya dapat dimulai dengan memperbaiki tingkat pemerataan distribusi pendapatan diantara berbagai golongan ekonomi masyarakat. Pembangunan tingkat kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Gorontalo dapat dipandang sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat/warganya.

Pembangunan ekonomi pada satu sisi merupakan suatu proses yang bersifat multi dimensional yang mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi pemerintahan dan masyarakat, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi, pada hakikatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan. Untuk itu, proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Gorontalo tidak terjadi sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai

pihak untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya penduduk Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini Bappeda Kabupaten Gorontalo sejak awal menyadari adanya kondisi eksisting maupun potensi adanya kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Gorontalo (maupun di daerah lainnya di Indonesia maupun di Provinsi Gorontalo), sehingga penting untuk selalu ditinjau/dievaluasi. Dari hasil evaluasi harapannya bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo yang cukup pesat namun fluktuatif saat ini pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya, atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

1.2. Rumusan Masalah

Jika diamati wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang ditopang oleh sumber daya alam khususnya sektor pertanian, perdagangan dan pembangunan ekonomi idealnya akan lebih cepat dibanding wilayah lainnya, akan tetapi ada juga wilayah yang hanya merupakan wilayah perumahan yang penduduknya relatif mapan, ada pula daerah yang secara potensi wilayahnya tinggi karena memiliki potensi pertanian produktif tetapi bisa jadi perekonomian masyarakatnya relatif rendah. Dengan dasar pemikiran tersebut maka perlu dilakukan kajian yang dapat melihat tingkat kesenjangan baik dilihat sisi ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan antar wilayah serta melakukan identifikasi kesenjangan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Gorontalo.

Pertanyaan yang harus dikaji lebih mendalam adalah, apakah keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro di Kabupaten Gorontalo juga menyebabkan kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera? Apakah hasil pembangunan tersebut dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Kabupaten Gorontalo? Untuk

mengkaji hal tersebut perlu diukur dengan melihat indikator-indikator yang menggambarkan kondisi secara umum permasalahan distribusi pendapatan yang ada. Alat atau indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang umum digunakan adalah Koefisien Gini (*Gini Ratio*) dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian, yaitu:

- a. Mengidentifikasi kesenjangan pendapatan baik antara wilayah maupun antar kelompok masyarakat Kabupaten Gorontalo
- b. Melakukan analisis angka keefisien gini Kabupaten Gorontalo.

1.4. Luaran (*Output*)

Luaran yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah:

- a. Menemukan teori-teori baru tentang analisis identifikasi ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penetapan rencana pembangunan.
 - b. Adanya pengembangan pengetahuan dibidang ilmu ekonomi pembangunan yang dapat diajarkan bagi para mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - c. Publikasi ilmiah di jurnal yang memiliki ISSN dan terakreditasi secara nasional.
- Rencana capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Rencana Target Capaian

NO.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber ISSN)	. Published
2.	Pemakalah dalam pertemuan Ilmiah	Nasional Lokal
3.	Buku ajar Draft	Draft
4.	Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial)	
5.	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan,

(4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

2. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). PDRB perkapita sebagai proxy dari pendapatan perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dan adanya aktivitas produksi. Sedangkan PDRN perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Kedua indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

2.2 Konsumsi Rumah Tangga

Dilihat dari arti ekonomi, konsumsi merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda. Sedangkan menurut Drahmann Bannoch dalam bukunya "*economics*" memberikan pengertian tentang konsumsi yaitu merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (dalam setahun) pengeluaran. Pembelian masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang

diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.

Pengeluaran konsumsi masyarakat adalah salah satu variabel makro ekonomi yang dilambangkan dengan huruf "C". Konsep konsumsi "*Consumption*", merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga ke atas barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang melakukan pembelanjaan tersebut atau juga pendapatan yang dibelanjakan. Sedangkan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Pengeluaran atau konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan kedalam pengeluaran rata-rata sebulan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga ialah:

A. Faktor Ekonomi

Empat faktor yang menentukan tingkat konsumsi, yaitu :

a) Pendapatan Rumah Tangga (*Household Income*)

Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin baik tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar atau mungkin juga pola hidup menjadi semakin konsumtif, setidaknya-tidaknya semakin menuntut kualitas yang baik.

b) Kekayaan Rumah Tangga (*Household Wealth*)

Tercakup dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah kekayaan riil (rumah, tanah, dan mobil) dan *financial* (deposito berjangka, saham, dan surat-surat

berharga). Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi, karena menambah pendapatan *disposable*.

c) Tingkat Bunga (*Interest Rate*)

Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi (*opportunity cost*) dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi mereka yang ingin mengonsumsi dengan berutang dahulu, misalnya dengan meminjam dari bank atau menggunakan kartu kredit, biaya bunga semakin mahal, sehingga lebih baik menunda/mengurangi konsumsi.

d) Perkiraan Tentang Masa Depan (*Household Expectation About TheFuture*)

Faktor-faktor internal yang dipergunakan untuk memperkirakan prospek masa depan rumah tangga antara lain pekerjaan, karier dan gaji yang menjanjikan, banyak anggota keluarga yang telah bekerja. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian domestik dan internasional, jenis-jenis dan arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.

B. Faktor Demografi

a) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relative rendah. Pengeluaran konsumsi suatu negara akan sangat besar, bila jumlah penduduk sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat tinggi.

b) Komposisi Penduduk

Pengaruh komposisi penduduk terhadap tingkat konsumsi, antara lain :

- 1) Makin banyak penduduk yang berusia kerja atau produktif (15-64 tahun), makin besar tingkat konsumsi. Sebab makin banyak penduduk yang bekerja, penghasilan juga makin besar.
- 2) Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga makin tinggi, sebab pada saat seseorang atau suatu keluarga makin berpendidikan tinggi maka kebutuhan hidupnya makin banyak.
- 3) Makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan (urban), pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi. Sebab umumnya pola hidup masyarakat perkotaan lebih konsumtif dibanding masyarakat pedesaan.

C. Faktor-faktor Non Ekonomi

Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor social budaya masyarakat. Misalnya saja, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat/ideal.

2.3 Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada dibawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari ukuran dan indicator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata-rata distribusi, dan karenanya membuat ukuran distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan.

Masalah utama dalam distribusi pendapatan sebuah daerah adalah ketidakmerataan pendapatan antar kelompok masyarakat dalam daerah tersebut, oleh karenanya sering juga disebut tingkat ketidakmerataan atau kesenjangan (*inequality*). Cara distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pendapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat.

Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.

2.4 Ketimpangan Pendapatan dan Pembangunan

Perubahan ekonomi di samping mengejar laju pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan aspek pemerataan. Ada dua argumen yang berhubungan dengan masalah pembangunan ekonomi dengan pemerataan (Todaro, 2000).

a. Argumen tradisional

Argumen tradisional menfokuskan lebih di dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan yang sangat tidak merata merupakan sesuatu yang terpaksa dikorbankan demi memacu laju pertumbuhan ekonomi secara cepat.

Akibat dari pengaruh teori dan kebijakan perekonomian pasar bebas, penerimaan pemikiran seperti itu oleh kalangan ekonom pada umumnya dari negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, baik secara implisit maupun eksplisit menunjukkan bahwa mereka tidak begitu memperhatikan pentingnya masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Mereka tidak saja menganggap ketidakadilan pendapatan sebagai syarat yang pantas dikorbankan dalam menggapai proses pertumbuhan ekonomi secara maksimum dan bila dalam jangka panjang hal itu dianggap syarat yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk melalui mekanisme persaingan penetasan kebawah (*trickle down effect*) secara alamiah.

b. Argumen tandingan

Karena terdapat banyak ekonom pembangunan yang merasa bahwa pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara-negara berkembang tidak bisa di nomor duakan, karena hal itu merupakan suatu kondisi penting atau syarat yang harus diadakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000). Dalam argumen tandingan tersebut terdapat lima alasan yaitu;

Pertama, ketimpangan yang begitu besar dan kemiskinan yang begitu luas telah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap perolehan kredit. Berbagai faktor ini secara bersama-sama menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan GNP per kapita dibandingkan jika terdapat pemerataan pendapatan yang lebih besar.

Kedua, berdasarkan observasi sekilas yang ditunjang oleh data – data empiris yang ada kita mengetahui bahwa tidak seperti yang terjadi dalam sejarah pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, orang-orang kaya di negara-negara dunia ketiga tidak dapat diharapkan kemampuan atau kesediaannya untuk menabung dan menanamkan modalnya dalam perekonomian domestik.

Ketiga, rendahnya pendapatan dan taraf hidup kaum miskin yang berwujud berupa kondisi kesehatannya yang buruk, kurang makan dan gizi dan pendidikannya yang

rendah justru akan menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan pada akhirnya mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat, upaya-upaya untuk menaikkan tingkat pendapatan penduduk miskin akan merangsang meningkatkannya permintaan terhadap barang-barang produksi dalam negeri seperti bahan makanan dan pakaian.

Kelima, dengan tercapainya distribusi pendapatan yang lebih adil melalui upaya-upaya pengurangan kemiskinan masyarakat, maka akan segera tercipta banyak insentif atau rangsangan-rangsangan materiil dan psikologis yang pada gilirannya akan menjadi penghambat kemajuan ekonomi.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa promosi pertumbuhan ekonomi secara cepat dan upaya-upaya pengentasan kemiskinan serta penanggulangan ketimpangan pendapatan bukanlah tujuan-tujuan yang saling bertentangan sehingga yang satu tidak perlu diutamakan dengan mengorbankan yang lain. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, ketimpangan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan (Riadi, 2007).

Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Bertitik tolak dari kenyataan itu, ketimpangan/ kesenjangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Menurut Myrdal (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidak seimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyad, 1999). Adapun faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah (Manik, 2009) yaitu

:

a) Perbedaan kandungan sumber daya alam

Terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah akan mendorong timbulnya ketimpangan antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, atau kesuburan lahan tentunya mempengaruhi proses pembangunan di masing-masing daerah. Ada daerah yang memiliki minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak memilikinya. Ada daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tetapi daerah tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah.

Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam yang lebih rendah. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain.

b) Perbedaan Kondisi Demografi

Faktor utama lain yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan antar daerah adalah jika terdapat perbedaan kondisi demografi yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografi meliputi tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan dan tingkah laku masyarakat daerah tersebut.

Perbedaan kondisi demografi ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan antar daerah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografi yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografinya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang

menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.

c) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa (perdagangan) antar daerah jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bila kegiatan perdagangan (baik internasional maupun antar wilayah) kurang lancar maka proses penyamaan harga faktor produksi akan terganggu. Akibatnya penyebaran proses pembangunan akan terhambat dan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung menjadi tinggi.

Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Bila mobilitas barang tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja di suatu daerah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan antar daerah akan cenderung tinggi. Mobilitas barang dan jasa ini mengacu pada penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas di dalam suatu daerah, seperti: jalan, jembatan, alat transportasi baik darat, laut maupun udara dan lainlain.

d) Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah

Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar daerah karena proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi.

Demikian pula sebaliknya terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula, apabila konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang

selanjutnya juga mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Terdapatnya lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya menyangkut pertumbuhan kegiatan pertanian. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut, dan udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografi (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

e) Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat menarik lebih banyak investasi pemerintah dan swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan tenaga kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya terjadi bila investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyata lebih rendah.

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan antar daerah cenderung tinggi. Akan tetapi sebaliknya bilamana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak di alokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar daerah cenderung lebih rendah.

Tidak demikian halnya dengan investasi swasta yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah, sedangkan keuntungan lokasi tersebut ditentukan pula oleh ongkos transportasi baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa

tanah. Termasuk ke dalam keuntungan lokasi ini adalah keuntungan aglomerasi yang timbul karena terjadinya konsentrasi beberapa kegiatan ekonomi terkait pada suatu daerah tertentu. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana investasi cenderung lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Selanjutnya menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (Arsyad, 1988) mengemukakan ada 8 sebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yaitu :

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capitalintensive*), sehingga persentase pendapatan dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*terms of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri kerjainan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Menurut Kuznet, distribusi pendapatan dikatakan betul-betul merata apabila setiap kelompok rumahtangga atau penduduk dalam setiap desil proporsipendapatannya harus sama dengan 1/10 (10 persen). Hal ini berarti bahwa mereka yang menerima 10 persen pendapatan paling bawah jumlahnya kira-kira

sama dengan 10 persen jumlah penduduk; yang menerima pendapatan 20 persen paling bawah jumlahnya sama dengan 20 persen jumlah penduduk, dan begitu seterusnya. Namun pada kenyataan tidaklah semudah itu penerapannya pada suatu wilayah. Kesenjangan distribusi pendapatan untuk kelompok tertentu tetap masih ada. Hal ini salah satunya disebabkan oleh monopoli pada berbagai bidang usaha oleh sekelompok orang yang memiliki modal besar, sehingga kelompok ini mendominasi pendapatan. Sementara itu kelompok dengan pendapatan rendah akan semakin memperoleh proporsi yang lebih kecil. Seringkali kelompok dengan pendapatan rendah ini tidak merasakan adanya ketimpangan karena merasa pendapatan mereka secara absolute meningkat dari waktu ke waktu. Namun apabila dihitung menurut porsi pendapatan yang mereka terima terhadap total pendapatan di suatu daerah, porsi pendapatan mereka mengalami penurunan atau dengan kata lain ketimpangan pendapatan makin melebar.

Dalam konteks ekonomi Aspek “keadilan dan pemerataan” selain dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, namun dapat pula ditinjau menurut perbandingan antar daerah (Raksaka Mahi, 2000).

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik memenuhi beberapa syarat seperti:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisinya tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari sisi kaya ke sisi miskin akan menurunkan ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi kriteria ini.

Selain itu ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut:

a) Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub kelompok masyarakat (subgroup).

b) Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk. Pada saat membahas kesenjangan pendapatan golongan penduduk akan terkait dengan perbandingan kesenjangan antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin, ini menimbulkan konsep “garis kemiskinan (*poverty line*) yang menunjukkan batas terendah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Penduduk yang berada digaris kemiskinan (*absolute poverty*) apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paling pokok seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan kesehatan dan lainnya

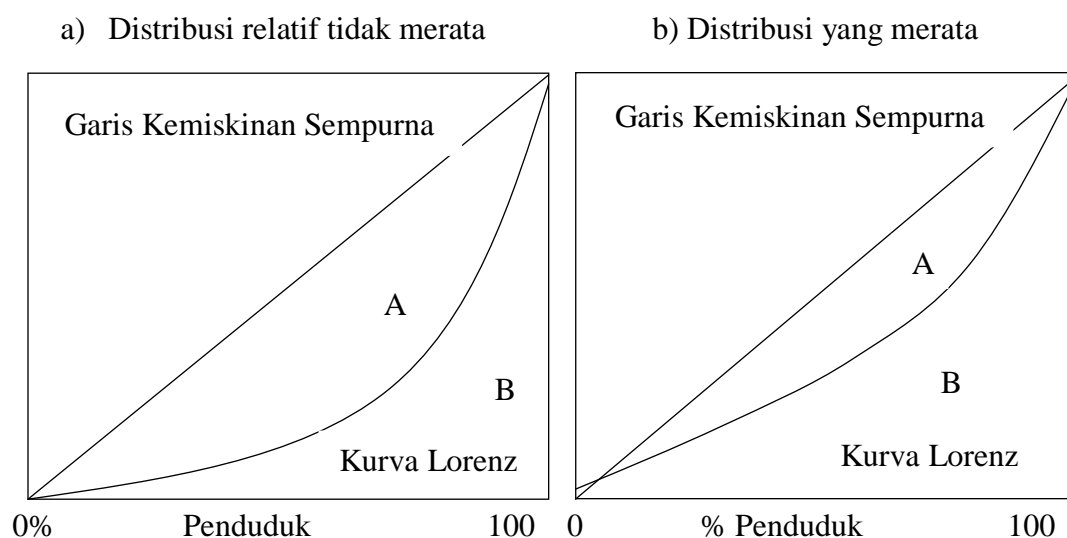
2.5 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz diperkenalkan oleh Conrad Lorenz seorang ahli statistik dari Amerika Serikat pada tahun 1905. Kurva tersebut menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima dalam kurun waktu tertentu. Sumbu horisontal menunjukkan jumlah penerima pendapatan yang digambarkan dalam persentase kumulatif. Sumbu vertikal menunjukkan pangsa (*share*) pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk. Jumlah ini juga kumulatif sampai 100 persen, dengan demikian kedua sumbu itu sama panjangnya dan akhirnya membentuk bujur sangkar.

Sebuah garis diagonal digambarkan melalui titik origin menuju sudut kanan atas dari bujur sangkar tersebut. Setiap titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatan yang diterima sama persis dengan persentase penerima

pendapatan tersebut. Kata lain, garis diagonal tersebut menunjukkan distribusi pendapatan dalam keadaan “kemerataan sempurna” (*perfect equality*). Oleh karena itu garis tersebut biasa juga disebut garis pemerataan sempurna.

Jadi semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (garis pemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Semakin tinggi derajat ketidakmerataan, kurva Lorenz ini akan semakin melengkung (cembung) dan semakin mendekati sumbu horisontal sebelah bawah.



Gambar 2.1.

Derajat Kemerataan/Ketidak Merataan Menurut Kurva Lorenz

2.6 Tehnik Penghitungan Ketimpangan

Ada beberapa alat ukur untuk mengukur ketimpangan, pada penelitian ini disajikan dua indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, yakni Gini Ratio dan Ukuran Bank Dunia.

a. Koefisien Gini (Gini Ratio)

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif

penduduk. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Jika $A = 0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B = 0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

Formula yang digunakan untuk menghitung Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah sebagai berikut:

$$GC = 1 - (X_i - X_{i-1})(y_i + y_{i-1})$$

Dimana :

GC = Gini Coefficient (Gini Ratio)

X_i = Persentase Jumlah Penduduk Kumulatif ke-i

Y_i = Persentase Jumlah Pendapatan Penduduk Kumulatif ke-i

b. Relative Inequality

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan Gini Ratio baru menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara global. Sejauh mana atau berapa bagian yang diterima oleh kelompok berpendapatan terendah/miskin belum nampak jelas. Sehubungan dengan ini, ukuran yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia (World Bank) dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex, memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (*inequality*) melalui indikator yang disebut *relative inequality* atau biasa disebut dengan kriteria bank dunia.

Kriteria bank Dunia ini, membagi jumlah penduduk ke dalam tiga kelompok, yakni 20 % penduduk berpendapatan tinggi, 40 % berpendapatan menengah dan 40 % berpendapatan rendah. Kelompok pertama adalah bagian dari penduduk terkaya dan kelompok ketiga adalah bagian dari populasi termiskin.

Kelompok kedua sering dikatakan sebagai masyarakat kelas menengah. *Relative, inequality* diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Adapun kriteria *relative inequality* adalah:

High inequality (distribusi pendapatan sangat pincang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.

Moderate inequality (kepincangan dianggap sedang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 sampai 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau GNP.

Low inequality (distribusi pendapatan tidak terlalu pincang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.

c. Indeks Williamson

Ukuran ketimpangan pendapatan lainnya yang lebih penting lagi untuk dikaji adalah kesenjangan antar wilayah/daerah dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah dengan rumus:

di mana:

V_w = indeks Williamson

Y_i = pendapatan per kapita di kecamatan ke i

Y = pendapatan per kapita rata-rata seluruh kecamatan

F_i = jumlah penduduk di kecamatan i

n = jumlah penduduk kabupaten

Indeks ketimpangan Williamson (VW) yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika VW mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika VW mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata.

2.7 Kategori Ketimpangan

Indeks Gini yang diperoleh juga bisa dihitung berdasarkan data pengeluaran. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai satu berarti ketimpangan

sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro ekonomi, LPEM-FEUI, 1995 :

- $GR < 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0.4 < GR < 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Ketimpangan pendapatan dengan menggunakan ukuran Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki *ketimpangan pendapatan tinggi*;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan *sedang/menengah*;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, maka distribusi pendapatan di kategorikan sebagai memiliki *ketimpangan pendapatan rendah*

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk dijadikan referensi dalam rangka penajaman analisis sebagai berikut :

1. Daniel Suryadarma, dkk (2005), dalam penelitiannya berjudul *A Reassessment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia*, bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan ketimpangan pada saat Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan saat terjadi krisis, serta menguji apakah ketimpangan berhubungan dengan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran tentang ketimpangan di Indonesia selama periode tahun

1984 hingga 2002 dengan menggunakan beberapa pengukuran ketimpangan yaitu Gini Ratio, Generalized Entropy (GE) Index, dan Atkinson Index. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa walaupun ketika terjadi krisis semua metode pengukuran menunjukkan penurunan ketimpangan, namun sebenarnya terjadi peningkatan tetapi dibawah garis kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan adanya penjelasan penting yaitu bahwa tingkat kemiskinan menurun dengan cepat antara tahun 1999 dan 2002, yang disebabkan karena ketimpangan selama krisis pada tahun 1999 berada pada tingkat paling rendah.

2. R. Gunawan Setianegara (2008), dalam penelitiannya berjudul *Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Krisis Ekonomi dan Kemiskinan*, bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dalam penelitian ini juga menggambarkan bagaimana keadaan ketimpangan pendapatan Indonesia dimulai dari tahun 1960-an hingga akhir tahun 1999 menggunakan alat pengukur ketimpangan yaitu Gini Ratio. Menurut Gunawan, ada banyak analisis yang membuktikan bahwa walaupun tingkat pertumbuhan tinggi akan selalu menyebabkan tingkat ketimpangan pendapatan tinggi. Selain itu jumlah penduduk miskin di Indonesia juga akan selalu berubah seiring tinggi rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan.
3. Tadashi Kikuchi melakukan penelitian yang berjudul *“An analysis of the impactsof development on Gini inequality using grouped and individual observations:Examples from the 1998 Vietnamese Household Expenditure Data”*. Penelitian ini mengenalkan beberapa pendekatan berorientasi pada kebijakan yang relevan yang mengukur dampak ekonomi dari perkembangan kesenjangan sosial. Kurva Lorenz secara luas digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kemiskinan dari suatu negara berkembang dan kerugian dalam keseimbangan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan gagasan yang telah dikenalkan dalam jurnal Kakwani and Podder untuk menggambarkan gagasan mereka yang akan bisa menjadi sebuah alat yang berguna untuk analisa politik. Faktanya, ketika mengukur suatu pengaruh dari

program pengembangan milik pemerintah, penggunaan data individu memberikan evaluasi yang membantu memperjelas dan bersih dari sebuah kebijakan.

The method :

Dalam penelitian ini metode pengukurannya menggunakan *Kurva Lorenz* dan *Gini inequality*, serta dengan menggunakan data individu dari survei rumah tangga di Vietnam.

Resume :

Walaupun Vietnam adalah negara berkembang dengan pendapatan yang rendah, namun negara ini memiliki riwayat bagus dalam stabilitas makro-ekonomi dan pengurangan kemiskinan sejak pelaksanaan program renovasi ekonomi yang dikenal sebagai “Doi moi” pada tahun 1986. Pemerintah Vietnam telah berhasil dalam usahanya untuk pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan diakui secara luas dan dibuktikan dengan pencapaian yang menyokong kehidupan sosial sebagai indikator ekonomi. Survey Masyarakat Vietnam pada 1998 tentang Data Pengeluaran Rumah Tangga, yang merupakan bagian dari Survey Standar Kehidupan Vietnam (SSKV) diselenggarakan antara tahun 1997 dan 1998, digunakan untuk tujuan penelitian ini. Dua taraf sampling acak telah dikeluarkan dalam survey skala nasional yang diselenggarakan oleh Bank Dunia dan Biro Pusat Statistik (BPS) di Vietnam. Berdasarkan hasil yang diperoleh secara empiris dalam jurnal ini, terdapat beberapa saran mengenai persoalan untuk negara Vietnam dalam pencapaian keberhasilan dari “Doi moi” reformasi dan dalam pencarian pengembangan berkelanjutan untuk dekade berikutnya. Pada 7 November 2006, Vietnam menjadi anggota ke-150 dari WTO dan tentunya akan menikmati “keuntungan perdagangan” difasilitasi oleh ekonomi global di masa depan. Akan tetapi, karena ketidakmatangan dalam ekonomi pasar, akan memerlukan waktu agar pasar mencapai keseimbangan baik dari penawaran maupun permintaan dalam penentuan harga, dan sebaliknya, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan regional adalah salah satu dari sedikit pilihan politik untuk pengembangan. Pertama, analisa baik jumlah data maupun data individu dibawah metodologi yang tepat sangat berguna untuk mengklarifikasi hubungan ekonomi antara hubungan sebab-akibat dan pengeluaran;

hal ini memungkinkan verifikasi dan perbandingan dengan hasil lainnya yang telah dicapai melalui kebijakan alternatif dan urutan prioritas diatas kebijakan-kebijakan lainnya. Kedua, dari pandangan jangka panjang, Vietnam harus merencanakan sebuah strategi untuk merealisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat dalam persiapannya untuk kompetisi yang berat dalam ekonomi pasar. Menyediakan pelatihan bagi karyawan-karyawan yang tidak berkeahlian khusus dalam area perkotaan juga cukup penting untuk menawarkan kesempatan edukasi yang lebih baik di seluruh negeri. Sayangnya, di Vietnam, pasar pekerja masih kurang berkembang, dan para petaninya yang pindah dari desa ke kota jarang yang menemukan pekerjaan yang lebih baik di sector industry sektor utama yang menjalankan perindustrian dan kebanyakan mendapatkan pekerjaan di sektor jasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian-nya adalah Kabupaten Gorontalo dan objek penelitian adalah distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini mencatat, menuturkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis serta mendeskripsikan data dan informasi-informasi yang ada mengenai kenyataan yang terjadi mengenai distribusi pendapatan. Data utama yang digunakan adalah data sekunder, tentang distribusi pendapatan dengan menggunakan proxy pengeluaran/konsumsi rumah tangga sebagai pengganti data pendapatan masyarakat, karena data pendapatan sendiri di Indonesia masih belum tersedia.

Disamping data sekunder juga dilakukan pengumpulan data melalui data primer dengan pendekatan observasi dan dengan menggunakan kuosioner terhadap pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Gorontalo. Survei yang langsung ditujukan untuk mendapatkan data pendapatan masyarakat seringkali sulit dilakukan, terutama dalam teknis wawancara. Karena itu pendapatan rumah tangga dalam hal ini didekati dengan pengeluaran rumah tangga. Tingkat kesejahteraan suatu rumahtangga dapat dilihat dari besarnya konsumsi atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga. Peningkatan konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, terutama pengeluaran untuk bukan makanan, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan. Rumah tangga dengan pendapatan rendah akan mendahulukan pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan dengan kebutuhan non makanan. Pada kelompok masyarakat seperti ini terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi makanan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, maka akan terjadi pergeseran pola konsumsi pengeluaran. Lambat laun akan terjadi

penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan sebaliknya terjadi peningkatan pada pengeluaran konsumsi bukan makanan. Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan akan semakin jelas pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan sebagian besar akan digunakan untuk barang bukan makanan, ditabungkan ataupun diinvestasikan. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dan perubahan komposisi pengeluaran dapat memberikan indikasi perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

3.3 Metode Pengumpulan Data

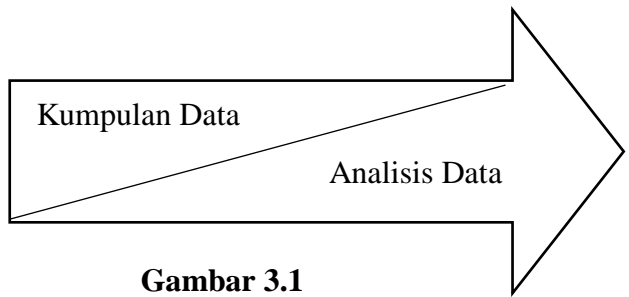
Ada dua macam teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam pengkajian ini, yaitu:

1. Data Primer, data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data primer ini ialah dengan cara survei.
2. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BPS, maupun instansi-instansi lainnya.

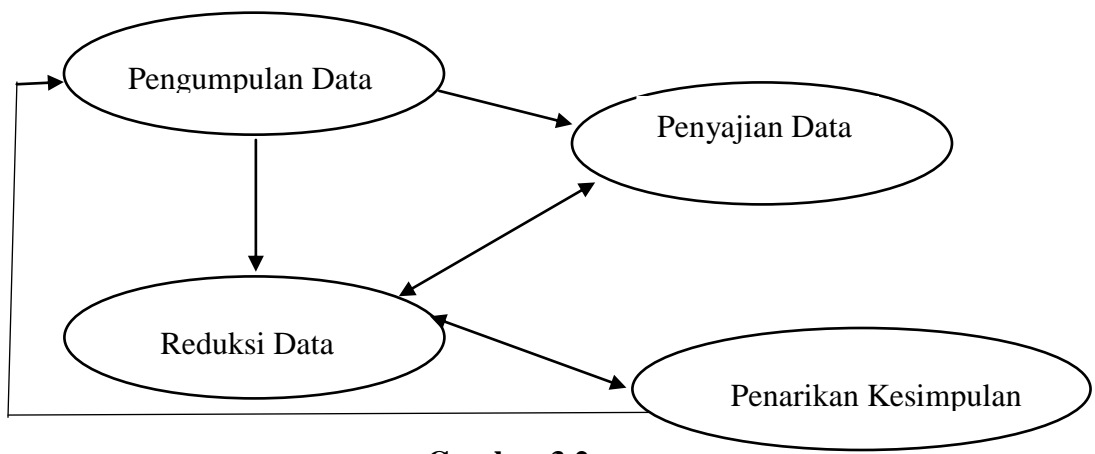
3.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memaparkan semua data dan informasi berdasarkan data yang bersumber pada data sekunder, jurnal, artikel, studi literatur, hasil survei, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data kuantitatif pengeluaran / konsumsi rumah tangga perkapita, data PDRB, serta data jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2012 hingga 2017. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil survey mengenai pengeluaran/konsumsi rumah tangga perkapita dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.



Gambar 3.1
Proses Penelitian Analisa Deskriptif



Gambar 3.2
Analisis Data Deskriptif (Dikembangkan oleh Miles & Rubermas)

3.6 Desain Pengukuran

Pengukuran distribusi pendapatan biasanya didekati dengan menggunakan data pengeluaran, karena data pendapatan masyarakat dalam kenyataannya masih sangat sulit diperoleh. Dalam hal ini analisis tingkat distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga dari hasil Susenas dan Suseda. Bagaimana pun juga, distribusi pengeluaran tidak akan sama dengan distribusi pendapatan. Namun cara ini dianggap sebagai pendekatan yang rasional untuk melihat trend dari distribusi pendapatan, walaupun harus di interperstasikan secara hati-hati.

Melalui data Susenas dan Suseda, nilai pendapatan masyarakat Kabupaten Gorontalo diestimasi dari data konsumsi dengan pendekatan rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan. Data yang dikumpulkan adalah data konsumsi yang mencakup seluruh kebutuhan hidup masyarakat. Mengingat jumlah komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat sangat banyak dan beragam, maka dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu konsumsi kelompok makanan dan konsumsi kelompok bukan makanan.

A. Konsumsi makanan, meliputi :

1. Konsumsi padi-padian (Beras, jagung terigu, dan lain-lain)
2. Konsumsi umbi-umbian (ketela, kentang, sagu, dan lain-lain)
3. Konsumsi ikan/udang/cumi/kerang (segar dan diawetkan)
4. Konsumsi daging (sapi, kerbau, kambing, ayam dan lain-lain)
5. Konsumsi telur dan susu
6. Konsumsi sayur-sayuran (bayam, wortel, cabe, dan lain-lain)
7. Konsumsi kacang-kacangan
8. Konsumsi buah-buahan
9. Konsumsi Minyak dan lemak
10. Konsumsi bahan minuman (gula, teh, kopi, coklat, sirup, dan lain-lain)
11. Konsumsi bumbu-bumbuan (garam, kemiri, merica, terasi, kecap, dan lain-lain)
12. Konsumsi lainnya (mie instan/basah, bihun, makaroni, kerupuk dan lain-lain)
13. Konsumsi makanan dan minuman jadi (roti, biskuit, bakso, nasi rames, minuman beralkohol dan non alkohol)

B. Konsumsi non makanan, meliputi :

1. Perumahan dan fasilitas rumahtangga (sewa/parkiran sewa, pemeliharaan/perbaikan ringan, rekening listrik/air/telepon, gas, minyak tanah, pulsa, dan lain-lain).
2. Aneka barang dan jasa (sabun/kosmetik, biaya kesehatan, pendidikan, transport, jasa lainnya).
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama (alat rumah tangga, elektronik dan lain-lain)
5. Pajak, pungutan dan asuransi.

6. Keperluan pesta dan upacara, tidak termasuk makanan. Untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Sedang untuk pengeluaran bukan makanan ditanyakan kondisi sebulan yang lalu dan satu tahun terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Desain kuesioner secara detail dibuat dengan harapan responden mampu mengingat nilai konsumsi yang dikeluarkannya.

3.7 Metode Perhitungan Gini Ratio

Data yang digunakan untuk menghitung distribusi pendapatan dengan menggunakan perhitungan *Gini Ratio* adalah dengan menggunakan data jumlah pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Data pengeluaran/konsumsi rumah tangga di proxy untuk menggantikan data pendapatan penduduk, karena data pendapatan penduduk belum tersedia di Indonesia. Walaupun data pengeluaran penduduk tersebut nilainya tidak menggambarkan pendapatan riil penduduk akan tetapi secara empiris terbukti dapat memberikan gambaran pendapatan penduduk untuk dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Formula yang digunakan untuk menghitung Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah sebagai berikut:

$$GC = 1 - \sum (X_i - X_{i-1})(y_i + y_{i+1})$$

Dimana:

GC = Gini Coefficient (Gini Ratio)

X_i = Persentase Jumlah Penduduk Kumulatif ke-i

Y_i = Persentase Jumlah Pendapatan Penduduk Kumulatif ke-i

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo

Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah, dilihat dari tahun 2012 - 2017 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo selalu mengalami kenaikan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2013 -2017 berada diatas 6 % tiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya bisa menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Gorontalo ternyata berdampak positif terhadap peningkatan PDRB di Kabupaten Gorontalo, dari tahun 2012-2017 PDRB per kapita di Kabupaten Gorontalo rata-rata selalu mengalami peningkatan. PDRB perkapita sebagai proxy dari pendapatan perkapita masyarakat merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dan adanya aktivitas ekonomi, jadi pendapatan perkapita merupakan cerminan dari pendapatan penduduk di suatu wilayah tersebut. Pendapatan perkapita di suatu wilayah tergantung dari jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut, semakin besar pendapatan perkapita yang dihasilkan oleh penduduk suatu wilayah dapat mengindikasikan bahwa masyarakat di wilayah tersebut lebih sejahtera jika laju pertumbuhan PDRB Perkapita tersebut lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.

Berikut ini adalah perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Gorontalo tahun 2012-2017.

Tabel 4.1
PDRB Kabupaten Gorontalo Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2012 – 2017 (dalam rupiah)

Tahun	PDRB	Pertumbuhan
2012	5.594.792,60	7.74
2013	6.028.615,18	7.73
2014	6.496.912,67	7.77
2015	6.905.553,36	6.31
2016	7.362.609,08	6.62
2017	7.863.978,8	6,81

Sumber : Kabupaten Gorontalo Dalam Angka, 2018

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2017
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Penduduk	Pertumbuhan
2012	5.594.792,60	7.74
2013	6.028.615,18	7.73
2014	6.496.912,67	7.77
2015	6.905.553,36	6.31
2016	7.362.609,08	6.62
2017	7.863.978,8	6,81

Sumber : Kabupaten Gorontalo Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 kita bisa melihat tingkat PDRB setiap tahun bertambah dengan laju pertumbuhan yang berbeda-beda atau fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 7,77 %, dan terendah terjadi pada tahun 2015 yang hanya 6,31 %.

Kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gorontalo masih di dominasi oleh sektor pertanian, kemudian diikuti oleh sektor industry pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran.

4.2 Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Gorontalo

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Porsi pengeluaran masyarakat dengan tingkat

pendapatan tinggi terhadap kebutuhan non makanan seperti: perumahan, barang dan jasa, pakaian, dan barang tahan lama (kendaraan, perhiasan dan sebagainya) biasanya lebih besar dibanding masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Pergeseran pola pengeluaran dari makanan ke non makanan terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini terlihat jelas pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanan sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan, ditabung, ataupun investasi.

Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat, dimana distribusinya merupakan distribusi pendapatan masyarakat yang dapat dijadikan petunjuk tingkat pemerataan pendapatan masyarakat. Tabel 4.3 menggambarkan pola pengeluaran masyarakat Kabupaten Gorontalo terhadap makanan dan non makanan. Dalam tabel tersebut digambarkan persentase pengeluaran rumah tangga menurut jenis pengeluaran makanan dan jenis pengeluaran non makanan. Pada pengeluaran makanan dirinci menurut jenis komoditi makanan. Sedangkan pengeluaran non makanan dirinci menurut kelompok non makanan yaitu: perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian, barang tahan lama, pengeluaran untuk pajak dan asuransi, dan pengeluaran lainnya (untuk pesta dan lain sebagainya).

Tabel 4.3
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kabupaten Gorontalo
Menurut Kelompok Barang
(Makanan dan Bukan Makanan)

Jenis Komoditi	Prosentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Per Bulan					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Makan						
1. Padi-Padian	44.095	45.084	44.262	58.936	65.157	69.107
2. Umbi-Umbian	1.993	1.629	2.050	2.150	2.176	2.471
3. Ikan/Cuma/Udah/Kerang	32.816	36.98	40.349	41.133	43.033	45.131
4. Daging	4.596	4.629	8.484	6.523	8.271	8.641
5. Telur/Susu	8.985	9.993	16.837	13,626	15.789	18.035
6. Sayuran	18.355	23.267	24.209	19.578	29.132	33.321
7. Kacang-Kacangan	3.198	3.918	4.325	3.371	5.278	6.365
8. Buah-Buahan	6.697	7.753	11.274	11.267	12.977	16.071
9. Minyak Lemak	10.164	11.176	12.122	11.104	10.641	12.043
10. Bahan Minuman	8.332	8.801	10.168	9.943	11.587	13.181
11. Bumbu-Bumbuan	4.692	6.203	6.494	6.597	8.299	9.309
12. Konsumsi Lain	3.054	3.207	4.187	4.572	4.696	5.020
13. Makanan & Minuman Jadi	46.993	57.655	80.520	74.098	87.384	93.408
14. Tembakau dan Sirih	27.960	30.838	37.139	40.235	46.580	52.176
Total Makanan	221.882	251.132	302.419	304.133	351.000	384.729
B. Bukan Makanan						
1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	63.532	73.322	86.254	133.597	163.034	164.540
2. Aneka Barang dan jasa	78.114	81.311	110.634	71.495	90.069	91.160
3. Pakaian, alas kaki, penutup kepala	17.243	19.141	24.658	19.233	25.060	26.161
4. Barang tahan lama	35.026	64.036	34.014	48.297	70.548	71.112
5. Pajak, pungutan, asuransi	3.138	5,292	7,20	9.135	9.231	9.605
6. Keperluan Pesta dan upacara	2.417	6.596	5,709	10.769	13.720	12.020
Total Non Makan	199.470	249.698	168.469	292.525	342.662	374.598
Pengeluaran Total	421.352	509.828	570.887	596.658	693.662	758.877

Sumber : BPS, 2017

Tabel 4.4.
Distribusi Prosentase Konsumsi Perkapita Kabupaten Gorontalo
Tahun 2012 -2017

Tahun	Makanan	Non Makanan
2012	52,66	47,34
2013	50,14	49,86
2014	64,22	35,78
2015	50,97	49,03
2016	50,60	49,40
2017	50,67	49,33

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.3 diatas kita bisa melihat, proporsi pengeluaran rumah tangga rata-rata perbulan yang dikeluarkan oleh rumah tangga di Kabupaten Gorontalo. Pengeluaran rumah tangga Kabupaten Gorontalo dari tahun 2012-2017 rata-rata masih didominasi oleh pengeluaran rumah tangga untuk bahan makanan. Dari data ini kita bisa melihat perkembangan pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Gorontalo masih belum mengalami pergeseran kebutuhan makanan ke non makanan, hal ini menunjukkan bahwa indikator bahwa konsumsi rumah tangga di Kabupaten Gorontalo masih terfokus pada kebutuhan pokok, dengan demikian masyarakat Kabupaten Gorontalo masih belum sejahtera secara umum jika diukur dari kelompok pengeluarannya.

Bila dilihat menurut komoditi makanan, pengeluaran terbesar penduduk Kabupaten Gorontalo yang paling banyak adalah untuk pengeluaran padi-padian, makanan jadi, ikan/cumi/kerang, tembakau dan sirih, sayuran, dan minyak lemak. Sedangkan pengeluaran terkecil terdapat pada pengeluaran ubi-ubian, kacang-kacangan dan konsumsi lainnya. Menurut komoditas bukan makanan, pengeluaran yang paling tinggi terdapat di perumahan dan aneka barang dan jasa serta barang yang tahan lama. Sedangkan pengeluaran terkecil terdapat di pajak dan asuransi. Apabila kita cermati pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Gorontalo terbanyak ternyata berada di golongan makanan, hal ini tidak terlepas dari julukan Kabupaten sebagai daerah berbasis pertanian, Bila melihat nilai persentasenya, pengeluaran makanan

yang dilakukan penduduk Kabupaten Gorontalo rata-rata diatas 52,44% tiap tahunnya, sedangkan untuk non makanan rata-rata sebesar 4,56%. Akan tetapi banyaknya pengeluaran non makanan yang dilakukan oleh penduduk di Kabupaten Gorontalo tidak mencerminkan seluruh masyarakat di Kabupaten Gorontalo memiliki tingkat kesejahteraan yang sama diukur dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, hal ini dikarenakan hanya masyarakat golongan menengah keatas saja yang melakukan pengeluaran non makanan yang lebih banyak, sedangkan masyarakat golongan bawah hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan makanannya saja.

Jika kita lihat berdasarkan tabel 4.4 diatas kita dapat mengetahui bahwa rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Gorontalo pada tahun 2016 secara keseluruhan sebesar Rp 4,562,720.16. Akan tetapi bila dibreakdown ke kecamatan masih belum dapat dijelaskan mengingat data PDRB Kecamatan belum tersedia di Kabupaten Gorontalo.

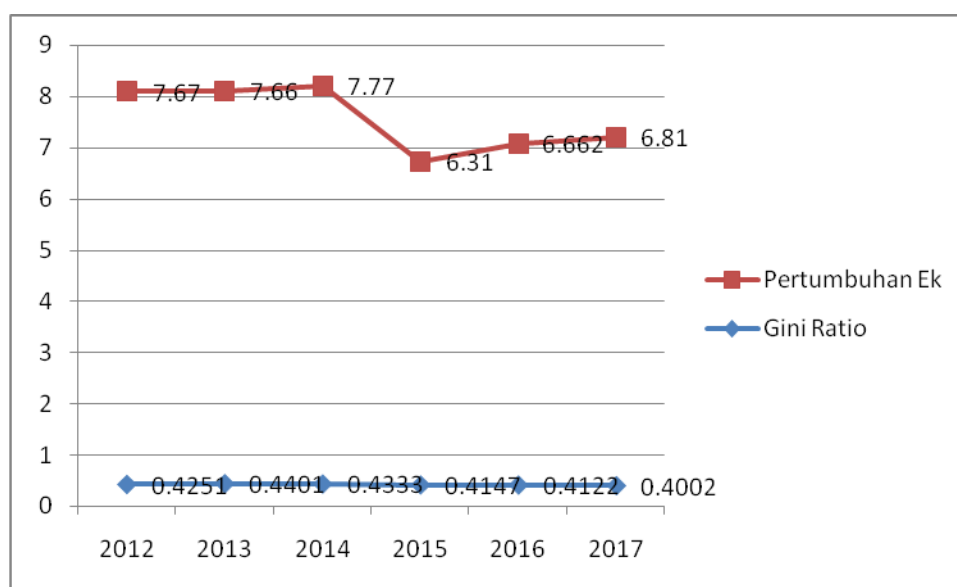
4.3 Kesenjangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Gorontalo

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo 2005-2025 telah mengamanatkan bahwa inti dari pelaksanaan pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam arti luas (*human welfare*). Aspek ini bisa melingkupi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga pemerataan distribusi pendapatan. Tidak bisa dipungkiri jika dalam suatu daerah ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat itu semakin tinggi, maka hal ini dapat menyebabkan adanya kecemburuan sosial dan bisa terjadi tindakan kriminal dalam suatu masyarakat.

Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan ketika menentukan karakteristik penduduk miskin. Hal yang penting untuk mendapat perhatian ialah tingkat pendapatan dan juga distribusinya di antara anggota rumah tangga dan diantara berbagai kelompok sosial. Meskipun demikian, dalam prakteknya indikator pendapatan sering menghadirkan masalah-masalah tertentu. Pendapatan sulit didefinisikan, karena pendapatan mencakup banyak komponen, namun hanya beberapa komponen yang berkaitan dengan moneter (misalnya, rumah tangga pertanian mengkonsumsi sebagian besar produksi sendiri). Kedua, individu cenderung membuat pernyataan yang keliru tentang tingkat pendapatannya, yang umumnya di

bawah perkiraan (*underestimated*). Dengan keterbatasan ini dan berdasarkan kenyataan bahwa nilai tabungan rendah, sering terjadi kecenderungan untuk menggunakan total pengeluaran rumah tangga sebagai pendekatan untuk pendapatan yang dibelanjakan.

Adanya ketimpangan yang besar antara si kaya dan si miskin dapat mengindikasikan bahwa pembangunan di daerah tersebut masih belum berhasil karena hanya dinikmati oleh sebagian orang saja, terutama orang kaya. Sedangkan orang yang miskin akan semakin menderita karena adanya ketimpangan tersebut. Gini Ratio merupakan suatu ukuran yang biasanya digunakan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat, walaupun masih ada ukuran-ukuran untuk mengetahui ketimpangan lainnya, akan tetapi Gini Ratio yang biasanya digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat. Berikut ini adalah perbandingan nilai gini rasio dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo.



Gambar 4.1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio
Kabupaten Gorontalo tahun 2012-2017

Berdasarkan gambar 4.2 dapat kita ketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012-2014 selalu mengalami kenaikan, namun pada tahun 2015 turun drastis hingga 6,31 % dan pada tahun 2016-2017, mengalami kenaikan lagi walaupun masih dibawah 7%. Akan tetapi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti juga dengan besarnya nilai gini ratio di Kabupaten Gorontalo. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tiap tahunnya bisa menyebabkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat semakin tinggi juga, hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gunawan mengenai Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Krisis Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia dari tahun 1960-1999. Selain itu ketimpangan pendapatan juga dapat menyebabkan bertambahnya penduduk miskin, dimana golongan orang-orang kaya akan semakin kaya dan golongan orang-orang miskin akan semakin miskin.

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gorontalo bisa terjadi dikarenakan belum adanya pemerataan lapangan kerja serta rendahnya daya beli masyarakat. Pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo belum terkonsentrasi dengan baik. Kawasan-kawasan yang diharapkan tumbuh cepat seperti Kecamatan Telaga yang berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo yang diharapkan sebagai akibat dari *trickle down effect* dari kota Gorontalo justru tidak terjadi secara signifikan. Kecamatan Limboto yang merupakan pusat pemerintahan tidak mampu menjadi kawasan kota yang cepat tumbuh, padahal potensi untuk menjadi kota cukup menunjang mengingat konsentrasi penduduk Kabupaten Gorontalo justru berada di Kecamatan Limboto. Wilayah Barat Kabupaten Gorontalo yang dikenal dengan Bilyohuto grup (kawasan yang dirancang untuk mendukung sektor industry dengan bahan baku hasil-hasil pertanian belum mampu tumbuh sesuai dengan yang rencanakan oleh pemerintah daerah. Demikian pula dengan kecamatan Tibawa yang rancang untuk menjadi wilayah perdagangan karena wilayah merupakan poros dari dan menuju daerah-daerah di Sulawesi Tengah dan Manado Sulawesi Utara. Belum berkembang sesuai yang diharapkan..

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dari penelitian Indeks Gini Ratio di Kota Bandung ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo yang rata-rata diatas 7% pertahun, pada tahun 2012-2014, namun sejak 2015 – 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo menurun dan hanya rata di atas 6%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo itu sudah tercapai, hal ini bisa dilihat dari distribusi pendapatan yang nilainya mencapai 0,4 yang berarti memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang sedang (Moderat).
2. Indeks Gini Ratio Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2012 – 2014 berada di angka lebih dari 0,4, angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki tingkat ketimpangan yang relatif sedang. Akan tetapi angka ini merupakan peringatan dini untuk Kabupaten Gorontalo agar bisa mengantisipasi kesenjangan distribusi pendapatan yang ada di kalangan masyarakatnya. Angka kesenjangan yang relatif tinggi dapat menyebabkan terjadinya kecemburuan-kecemburuan sosial diantara masyarakat, sehingga bisa menyebabkan adanya konflik sosial serta tindakantindakan kriminal lainnya.
3. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Gorontalo rata-rata mengalami kenaikan seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo yang rata-rata diatas 6 – 7 % pertahun .
4. Angka gini ratio di Kabupaten Gorontalo berdasarkan data terbaru hasil survey menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gorontalo selalu tidak menentu setiap tahunnya, erfluktuasi di atas 0,4 hingga tahun 2017, yang walaupun hal ini masih dikategorikan rendah (moderat) ketimpangan yang terjadi.

5.2. Rekomendasi

Memperhatikan analisis di Bab IV dan kesimpulan di Bab V maka rekomendasi dari kajian ini adalah:

1. Perlu dilakukan penyesuaian tingkat upah nominal sejalan dengan indikator tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehingga porsi pengeluaran makanan dan non makanan masyarakat dapat merepresentasikan kebutuhan masyarakat serta perubahan tingkat harga komoditas di Kota Bandung.
2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo diharapkan dapat mengoptimalkan kestabilan harga-harga komoditas bahan makanan dan non makanan sehingga perubahan tingkat pendapatan nominal masyarakat dapat sejalan dengan perubahan daya beli masyarakat terhadap komoditas bahan makanan dan non makanan di Kabupaten Gorontalo.
3. Sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Gorontalo mengarahkan APBD nya untuk tujuan-tujuan perbaikan dan penaingktan produktivitas sekr-sektor unggulan yang ada.
4. Perbaikan distribusi pendapatan dapat dilakukan/sejalan dengan program-program pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, sehingga melalui pengurangan pengangguran dan pengurangan tingkat kemiskinan porsi pengeluaran/belanja makanan dan non makanan penduduk dapat lebih merata sejalan dengan semakin turunnya jumlah peduduk miskin dan jumlah pengangguran.
5. Oleh karena struktur perekonomian di Kabupaten Gorontalo masih didominasi oleh sektor-sektor tersier atau sektor jasa, maka pengembangan sektor-sektor tersebut harus optimal (infrastruktur, regulasi, SDM dan lain-lain), sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dapat sejalan dengan perubahan tingkat pendapatan masyarakat atau tenaga kerja di sektor-sektor tersebut.
6. Program pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait pengembangan kawasan-kawasan ekonomi jangan dilakukan setengah-setengah, dan seharusnya terimplementasi melalui RPJMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R, 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adisasmita, R, 2008. *Ekonomi Archipelago*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Amir, Hidayat, & Riphath, Singgih, 2005. Analisis Sektor Unggulan untuk Evaluasi
- Arsyad, Lincoln, 2009. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPF, Yogyakarta.
- Aswandi, H, & Kuncoro, M, 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi
- Azis, Iwan J, 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Glasson, John, 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Jhingan, M. L, 2009. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Terjemahan D. Guritno. Rajawali, Jakarta.
- Kabupaten Dalam Angka, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gorontalo 2012-2017*.
- Marhayanie, 2003. Identifikasi Sektor Ekonomi Potensial dalam Perencanaan Pembangunan Kota Medan. *Tesis*. Program Pascasarjana USU, Medan.
- Mukhyi, Muhammad, Abdul. Analisis Peranan Subsektor Pertanian dan Sektor Unggulan terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Propinsi Jawa Barat: Pendekatan Analisis IRIO, Fakultas Ekonomi Gunadarma Jakarta <http://ejournal.gunadarma.ac.id/files/MA%20Mukhyi.pdf>, diakses pada tanggal 9 Februari 2009.
- Nazir, 2005, Metode Penelitian, Galia Indonesia, Jakarta
- Provinsi Dalam Angka, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo 2012-2013*.
- Provinsi Dalam Angka, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo* .
- Pusat Statistik, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gorontalo 2012-2017*.
- Richardson, Harry W, 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, Edisi Revisi, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2004. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Gunung Agung, Jakarta.
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Baduouse Media, Cetakan Pertama, Padang.
- Supangkat tahun 2002, Sektor Pembentuk PDRB. *Tesis*. Program Pascasarjana USU, Medan.
- Sukirno, Sadono, 2005. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan dasar Kebijakan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian, Erlangga, Jakarta
- Tarigan, Robinson, 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Edisi Keenam, Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Biaya

1. Honor				
Honor	Honor (Rp)/Jam	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per Tahun (Rp)
Ketua	20.400	20	10	4.080.000
Anggota 1	19.000	18	10	3.420.000
SUB TOTAL (Rp)				7.500.000
2. Bahan Habis Pakai dan Peralatan				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Hrg Peralatan (Rp)/Thn
Dokumentasi Wawancara	Bahan Survey Informan	1 buah	500.000	500.000
Bentuk Observasi Objek	Pengamatan interpretasi penerapan SAP pada laporan dan data PDRB	2 Kegiatan	250.000	500.000
Kertas HVS	Pencetakan Data Sheet Laporan dan Hasil Penelitian	4 Rim	40.000	160.000
Tinta Printer	Pencetakan data Sheet, Laporan dan Hasil Penelitian	4 Botol	47.500	190.000
Sewa Kamera	Dokumentasi penelitian	1 paket	500.000	500.000
Pengambilan data di BAPPEDA Provinsi Gorontalo	Pencetakan data laporan	1 paket	300.000	300.000
Pengambilan Data di Bappeda Kabupaten Gorontalo	Pencetakan data laporan	1 paket	250.000	250.000
Pembagian BPS Provinsi	Pencetakan data laporan	2 Kegiatan	250.000	500.000
Penjemputan BPS Kabupaten Gorontalo	Pencetakan data laporan	7 Kegiatan	100.000	700.000
Pengambilan Data di Dinas-Dinas terkait	Pencetakan data laporan	2 kegiatan	300.000	600.000
Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	Pencetakan data laporan	2 Kegiatan	250.000	500.000
Pembelian Buku sebagai Referensi	Pengolahan data	2 Bh	125.000	250.000
SUB TOTAL (Rp)				5.500.000
3. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)/Thn
Sewa Bentor / ojek	Survey dan Sampling	10	100.000	1.500.000
Sewa Rental	Survey dan Sampling	4	500.000	2.000.000
SUB TOTAL (Rp)				3.000.000
4. Lain-lain				
0 Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)/Thn
Penelusuran pustaka & Internet		4 Bulan	10.000	40.000
Monitoring dan evaluasi		1	100.000	100.000
Pengadaan Laporan	Output Laporan	3 Paket	70.000	210.000
Publikasi Ilmiah pada jurnal lokal	Jurnal	1	250.000	250.000
Pembuatan Buku Ajar	Buku Ajar		400.000	400.000
Seminar	Seminar Lokal	1 Paket	1.500.000	1.000.000
SUB TOTAL (Rp)				2.000.000

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELAMA SETAHUN	18.000.000
--	-------------------

Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)	Uraian Tugas
1	Harijono H. Imbran, SE.,M.Si NIDN: 0911046501	Universitas Muhammadiyah Gorontalo	Ekonomi	14	<ul style="list-style-type: none"> – Mengkoordinir penelitian secara keseluruhan dan bertanggung jawab pada laporan – Identifikasi dan pengumpulan data – Pengolahan data dan analisis lapangan
2	Rusdiyanto Tone, SE,M.Si NIDN: 091208102	Universitas Muhammadiyah Gorontalo	Ekonomi	14	<ul style="list-style-type: none"> – Identifikasi dan pengumpulan data – Pengolahan data dan Analisis lapangan

Lampiran 3. Biodata Ketua dan Tim Peneliti

Biodata Ketua Peneliti**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Harijono H. Imbran, SE.,M.Si
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NBM	-
5	NIDN	0911046501
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 11April 1965
7	Email	harijonoimbran@ymail.com
8	Nomor Telp/HP	0813 8210 0742
9	Alamat Kantor	Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda Desa Pentadio Timur Kab. Gorontalo
10	Nomor Telp/Fax	-
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 255 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Teori Ekonomi Mikro – Mikro
		2. Ekonomi Pembangunan
		3. Perencanaan Pembanguna
		4. Ekonomi Regional

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	STIE DLP Gorontalo	PPs Universitas Sam Ratulangi Manado	-
Bidang Ilmu	Ekonomi Pembangunan	Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah	-
Tahun Masuk-Lulus	1991	2007	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peranan SIMPEDES dan KUPEDES Dalam Menghimpun dan Menyalurkan Dana Pada BRI Cabang Limboto Kabupaten Gorontalo	Analisis Sektor Basis Kabupaten Gorontalo	-
Nama Pembimbing/Promotor	1.Dr. H. Karim Saleh, MS 2.H. Nuhung Ahmad, ,MS	1.Prof.Ir.J.W.P Mandagi,MSc,Ph.D 2.Noldy Tuerah, SE, MA, Ph.D 3.Prof,Ir. V. V. Rantung,MSc,Ph.D	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2017	Kajian Sektor Unggulan (Basis) Perekonomian Kabupaten Gorontalo	Simlatapmas	20

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2016	Anggota Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Gorontalo	Bappeda	150.000
2	-	-	-	-

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2015	Peranan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Derah Dalam Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Gorontalo	Mandiri	3.000.000
			-	-

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

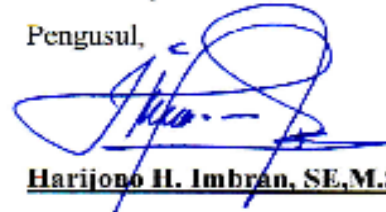
No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Narasumber pada Sosialisasi Penyusunan RPJM Kabupaten Gorontalo	Strategi Penyusunan Visi dan Misi Dalam Penyusunan RPJMD	2Maret 2016 / Ruang Pola Kantor Bappeda Kabupaten Gorontalo

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian dosen pemula.

Gorontalo, 19 Juni 2017

Pengusul,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hariono H. Imbran', written over a horizontal line.

Hariono H. Imbran, SE, M.Si

Biodata Tim Peneliti

1	Nama Lengkap	Rusdianto Tone, SE, M.Si
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	(Dalam Tahap Pengusulan)
4	NBM	-
5	NIDN	0912108102
6	Tempat Tanggal Lahir	Tibawa, 12 Oktober 1981
7	Email	Afganpurnama.ap@gmail.com
8	Nomor Telp/HP	0822 3663 0300
9	Alamat Kantor	Desa Pentadio Timur Telaga Biru Kab. Gorontalo
10	Nomor Telp/Fax	-
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1-0; S2 - 0 ; S3 -0
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Kewirausahaan/Enteprenurship 2. Pengantar Manajemen 3. Pengantar Ekonomi Bisnis

B. Riwayat Pendidikan

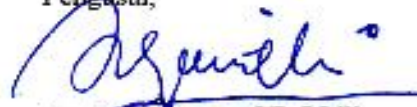
	D3	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	-	Universitas Gorontalo	STIE Menara Siswa Bogor
Bidang Ilmu	-	Ekonomi	Ilmu Administrasi
Tahun Masuk-Lulus	-	2004	2014
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	-	Analisis Saluran Distribusi Terhadap Penjualan Produk Nata Decoco PT. Iskogor Kabupaten Gorontalo	Analisis Distribusi Channel In Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produksi Kripik Pisang Purnama U.D. Afganpurnamandiri
Nama Pembimbing/Promotor	-	1. Elvis Mus Abdul, SE, MM 2. Idrus Usu, SE, MM	1. Prof. Dr. H. Johan Yassin, SH, MII. 2. Dr. Triyono, MM

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian dosen pemula.

Gorontalo, 19 Juni 2017

Pengusul,



Rusdianto Tone, SE, M.Si